



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 maka perlu dilakukan perubahan atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 44);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Merubah ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



EVI NARDI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 28 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60
 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN
 BELITUNG TIMUR ITAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA KAB BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
Misi 1: 1. Menerapkan konsep ketatapemerintahan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat di Belitung Timur agar tercipta sinergitas dan keharmonisan dalam pembangunan						
Tujuan 1.1 : Terselenggaranya tatakelola pemerintahan yang profesional, taat hukum, efisien, efektif dan akuntabel						
1.1.1	Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	Jumlah kerjasama daerah dibidang teknologi informasi	Fungsi Penunjang Lainnya	Sekretariat Daerah	Dokumentasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama daerah berbasis teknologi informasi
		Nilai evaluasi AKIP Kabupaten	Fungsi Penunjang Lainnya	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi	Nilai AKIP Kabupaten
		Persentase penempatan PNS yang sesuai dengan peta jabatan	Fungsi penunjang lainnya	BKPPD	Laporan Hasil Evaluasi	(jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan peta jabatan / jumlah pegawai yang ditempatkan x100)
		Persentase OPD pelayanan publik langsung kepada masyarakat yang menetapkan SOP-AP	Kesehatan, Pendidikan, Administrasi Kependudukan, Perizinan, Keuangan	OPD pelayan publik (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pendidikan,	Laporan	(Jumlah OPD pelayan Publik yang menetapkan SOP-AP / jumlah OPD pelayan Publik x 100)

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
			Daerah, Tenaga Kerja, Sosial, Ketertiban umum	Dinas PMPTSP, Dinas Tenaga Kerja dan KUMKM, Dinas Sospemdes, Dinas Capil, Kecamatan, Satpol-PP)		
1.1.2	Meningkatnya wawasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan, pemantapan ideologi negara, politik dan demokrasi	Angka partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia	(Jumlah masyarakat yang ikut Kegiatan demokrasi/Total masyarakat yang terdaftar dalam DPT) x100%
		Menurunnya Penyakit Masyarakat	Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Laporan	(jumlah kasus Pekat tahun sebelumnya-jumlah kasus pekat tahun sekarang)/ jumlah kasus Pekat Tahun sebelumnya x 100%
1.1.3	Terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Fungsi penunjang lainnya	Inspektorat	Dokumen Opini BPK atas Dokumen LKPD	Laporan BPK terhadap laporan keuangan
		Persentase temuan pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti	Fungsi penunjang lainnya	Inspektorat	Laporan hasil pemeriksaan BPK	(jumlah temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti / jumlah temuan pemeriksaan BPK x 100)
		Persentase temuan pemeriksaan Inspektorat yang telah ditindaklanjuti	Fungsi penunjang lainnya	Inspektorat	Laporan hasil pemeriksaan inspektorat	(jumlah temuan pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti / jumlah temuan pemeriksaan Inspektorat x 100)

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
		Persentase serapan belanja daerah	Fungsi penunjang lainnya	BPKPD, BP4D	Laporan Keuangan dan Laporan Monitoring dan evaluasi Fisik dan Keuangan	Total belanja yang terealisasi / total belanja x 100
1.1.4	Meningkatnya Pelayanan Publik	Persentase OPD pelayan publik dengan IKM baik	Kesehatan, Pendidikan, Administrasi Kependudukan, Perizinan, Keuangan Daerah, Tenaga Kerja, Sosial, Ketertiban umum	OPD pelayan publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pendidikan, Dinas PMPTSP, Dinas Tenaga Kerja dan KUMKM, Dinas Sospemdes, Dinas Capil, Kecamatan, Satpol-PP)	Hasil survey IKM OPD pelayan publik	Jumlah OPD pelayan publik dengan IKM >75 / jumlah OPD pelayan publik x 100
1.1.5	Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat dengan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan di level daerah	Penurunan Pelanggaran Perda	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pamong Praja	Laporan hasil kegiatan	Jumlah kasus pelanggaran perda yang tertangani
1.1.6	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang untuk	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah	(Jumlah usulan pada RPK yang diakomodir oleh PD/Jumlah total usulan pada RPK) x 100%

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
	partisipasi masyarakat dan swasta	pembangunan kabupaten				
		Jumlah Partisipasi kelompok masyarakat dalam proses perencanaan	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Jumlah kelompok masyarakat yang hadir pada Musrenbang Kabupaten / Jumlah kelompok masyarakat yang diundang pada Musrenbang Kabupaten x 100
		Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Jumlah stakeholder yang menyampaikan usulan
1.1.7	Berkembangnya tata kelola pemerintahan berbasis <i>e-government</i>	Jumlah OPD yang menerapkan <i>e-gov</i>	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan hasil kegiatan	Jumlah OPD yang menerapkan <i>e-gov</i>
		Jumlah sistem informasi yang telah terintegrasi	Komunikasi dan Informatika, perencanaan, keuangan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan	Jumlah sistem informasi yang telah terintegrasi
Misi 2: Membangun dan membenahi infrastruktur daerah untuk memperbaiki kinerja pelayanan						
Tujuan 2.1 : Meningkatkan Infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Belitung Timur						
2.1.1	Memperlancar akses dari dan ke kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten serta mendorong percepatan dan peningkatan kualitas	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
		Panjang jalan desa dan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah panjang jalan desa dan lingkungan yang dibangun

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
	layanan di kawasan perdesaan	lingkungan yang dibangun				
		Persentase Jumlah jembatan kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah jembatan dalam kondisi baik / jumlah jembatan 100
2.1.2	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Akses sanitasi masyarakat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	(Jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi layak / jumlah penduduk sekabupaten) x 100%
		Pengurangan kawasan kumuh	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	(Jumlah kawasan kumuh yang belum tertangani / Luasan kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati) x 100%
		Akses air bersih masyarakat	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	(Jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih / Jumlah penduduk sekabupaten) x 100%
		Persentase penduduk berakses air minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	(jumlah penduduk berakses air minum/jumlah penduduk) x 100%
Tujuan 2.2 : Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan pemerintah daerah						
2.2.1	Pembangunan infrastruktur kawasan strategis	Kawasan strategis kelautan dan perikanan dengan infrastruktur baik	Perhubungan, PUPR, DKP	Dinas Perhubungan, DisPUPR, DKP	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Kawasan strategis pariwisata dengan infrastruktur baik
		Kawasan strategis	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan Pariwisata	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	kawasan strategis pariwisata dengan infrastruktur baik

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
		pariwisata dengan infrastruktur baik		Ruang, dan Dinas Pariwisata		
2.2.2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase ruang terbuka hijau (RTH)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	(Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau / Jumlah wilayah berHPL/HGB) x 100%
		Persentase luas permukiman yang tertata dengan baik	Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	(Luas areal permukiman tertata DENGAN BAIK / luas area permukiman keseluruhan) x 100%
		Persentase penanganan sampah	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	(volume sampah yang ditangani / volume produksi sampah) x 100%
2.2.3	Terwujudnya sistem transportasi baik darat maupun laut dalam rangka pelayanan distribusi barang dan penumpang	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Panjang jalan / jumlah kendaraan
		Jumlah angkutan penumpang laik laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah angkutan penumpang laik laut
		Jumlah angkutan barang laik laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah angkutan barang laik laut
2.2.4	Pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	Ketaatan Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Realisasi RTRW / Rencana peruntukan x 100
Misi 3: Diversifikasi lapangan usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Belitung Timur untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup, pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan						
Tujuan 3.1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi						
3.1.1	Meningkatnya produksi pertanian, dan perikanan	Produksi padi	Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah produksi padi

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
		Produksi perikanan	Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Produksi perikanan
3.1.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun manca negara	Jumlah kunjungan wisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah kunjungan wisata domestik dan mancanegara
		Rata-rata lama tinggal wisatawan	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah rata-rata hari menginap wisatawan
3.1.3	Meningkatnya nilai investasi daerah	Lama proses perizinan	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Lama hari kerja proses pengurusan izin
		Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
Tujuan 3.2 : Peningkatan pendapatan masyarakat						
3.2.1	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Angka pengeluaran perkapita	Fungsi penunjang lainnya	Sekretariat Daerah	PDRB Menurut Lapangan Usaha	Ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli
3.2.2	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM masyarakat lokal.	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah koperasi aktif / jumlah seluruh koperasi
		Jumlah produk unggulan daerah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah produk unggulan daerah yang ditetapkan
Tujuan 3.3 : Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan						

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
3.3.1	Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan kesenjangan sosial	Persentase PMKS yang mengikuti program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	(Jumlah PMKS yang mandiri / jumlah PMKS) x 100%
		Tingkat kemiskinan	Fungsi Penunjang Lainnya	BP4D	Angka kemiskinan yang disampaikan oleh BPS	Angka kemiskinan
3.3.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	(Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja) x 100%
Tujuan 3.4 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,						
3.4.1	Meningkatnya pelayanan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil pendidikan	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)
		Angka partisipasi Murni sekolah SD/MI	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil pendidikan	(Jumlah murid SD/MI sederajat usia 6-12 tahun / jumlah anak usia 6-12 tahun) x 100%
		Angka partisipasi Murni sekolah SMP/MTs	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil pendidikan	(Jumlah murid SMP/MTs sederajat usia 13-15 tahun / jumlah anak usia 13-15 tahun) x 100%
		APM Pendidikan anak usia dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil pendidikan	(Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan anak / jumlah anak usia 4-6 tahun) x 100%
		Angka Putus Sekolah Pendidikan dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil pendidikan	(jumlah penduduk usia sekolah yang tidak berkolah lagi / jumlah penduduk usia sekolah yang pernah ata sedang bersekolah x 100)

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
		Persentase sekolah yang terakreditasi minimal B pada semua jenjang pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Profil pendidikan	Jumlah sekolah yang terakreditasi minimal B / Jumlah seluruh sekolah
3.4.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	Angka rata-rata tahun hidup yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dalam suatu mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat
		Persentase gizi buruk	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	Jumlah balita gizi buruk/jumlah balita x 100
		Persentase masyarakat mendapat pelayanan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	(Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan / jumlah penduduk x 100)
		Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Kesehatan	Dinas Kesehatan, Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan	(jumlah penduduk peserta JKN / jumlah penduduk x 100)
Tujuan 3.5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat						
3.5.1	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Profil Kesehatan	$r = \frac{1}{t} \times \ln\left(\frac{P_t}{P_0}\right)$

No	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan	Perangkat Daerah	Sumber Data	Keterangan
						Ket : P_t = Jumlah penduduk pada tahun ke-t P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = jangka waktu r = laju pertumbuhan penduduk
3.5.2	Terjaminnya perlindungan perempuan dan anak	Rasio KDRT	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah KDRT/ Jumlah Rumah Tangga x 100
3.5.3	Terwujudnya pelestarian seni dan budaya	Persentase kelompok kesenian tradisional aktif	Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah kelompok kesenian tradisional
		Jumlah event seni dan budaya	Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah event seni dan budaya
3.5.4	Meningkatnya pemuda berprestasi melalui peran serta aktif kepemudaan dan olahraga.	Jumlah pemuda pelopor	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah pemuda pelopor
		Persentase atlet berprestasi dalam bidang olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	(Jumlah pemuda berprestasi dalam bidang olahraga / jumlah pemuda yang ikut perlombaan olahraga) x 100%
		Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah medali emas, perak dan perunggu yang diperoleh

